

Nataru, TWC Tunggu Kebijakan Pusat

SLEMAN (KR) - Pengelola PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (TWCBPRB) masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti. Termasuk jika ada kebijakan seluruh objek wisata tutup.

"Sampai sekarang aturannya masih belum keluar. Ya kita akan ikuti, apapun itu. Termasuk jika harus tutup," tegas Direktur Utama PT TWCBPRB Edy Setijono, Selasa (30/11).

Saat ini tingkat kunjungan wisatawan di Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko menunjukkan tren positif. Khususnya mulai Agustus hingga November. Rata-rata kunjungan 1.000-2.000 wis-



KR-Atiek Widyastuti H.

Candi Prambanan masih menjadi jujukan wisatawan.

tawan pada hari biasa dan 3.000 di akhir pekan.

Jumlah tersebut jika di luar pandemi termasuk sedikit, atau sekitar 30 persen saja. Namun, di kala pandemi seperti saat ini sudah termasuk bagus. Terutama ketika Juli kemarin dimana wisatawan-nya sangat kecil. Bahkan bisa dikatakan zero. Harapannya pada akhir tahun, ada kenaikan wisatawan lain. Namun, adanya

kebijakan PPKM tentu harus disikapi secara bijak oleh semuanya. Baik itu industri pariwisata maupun masyarakat luas.

"Berbicara pariwisata itu tidak sebatas jumlah pengunjungnya saja. Namun ada pelaku lain yang bergantung pada kawasan pariwisata itu sendiri. Jika tidak ada wisatawan, tentu imbasnya juga akan lebih luas," ungkapnya.

(Awh)-f

TAK ADA RUANG UNTUK PENANGGUHAN UMK

Disnaker Deteksi Dini Perusahaan Rawan

SLEMAN (KR) - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman bakal melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap perusahaan yang dianggap rawan dalam memberikan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Hal ini dilakukan menyusul telah ditetapkannya UMK 2022 untuk Sleman sebesar Rp 2.001.000 yang mulai berlaku 1 Januari mendatang.

"UMK Sleman tahun 2022 ini naik sebesar Rp 97.500 atau 5,12 persen dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp 1.903.500," ungkap Kadisnaker Sleman Sutiasih di Press Room Humas Pemkab Sleman, Selasa (30/11). Hadir pula pada kesempatan itu Ketua DPK Apindo Sleman Sigit Yuwono dan Sekretaris SP-SI Sleman Fajar Yulianto.

Dijelaskan Sutiasih, sedikitnya ada 40 perusahaan

yang dianggap rawan dalam hal pengupahan. Di antaranya terkait dengan perusahaan padat karya atau melibatkan banyak tenaga kerja dan ada pengaduan dari pekerja. "Kami juga terus melakukan sosialisasi terkait UMK yang baru ini dengan harapan sekitar 2.300 perusahaan di Sleman bisa memberlakukan UMK tersebut," ujarnya.

"UMK tersebut sebetulnya lebih ditekankan pada

pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun tentu bakal menerima upah lebih banyak lagi karena bakal ditambah dengan tunjangan. Oleh karena itulah, Disnaker juga bakal meminta perusahaan untuk menyerahkan skala upah untuk mengontrol pengupahan perusahaan tersebut," kata Sutiasih.

Ditegaskan pula, perusahaan dilarang mengajukan penangguhan untuk pemberian UMP yang baru. Hal ini menyusul diberlakukannya UU Cipta Kerja yang tidak memberi ruang bagi perusahaan untuk menagguhkan pembayaran UMK. "Kalau perusahaan tidak mampu membayar UMK,

maka sifatnya bukan penangguhan melainkan dianggap utang perusahaan kepada pekerja yang harus dibayarkan," kata Sutiasih.

Sementara Sigit Yuwono mengaku, para pengusaha sebenarnya keberatan dengan besaran kenaikan UMK tersebut karena kondisi perusahaan belum pulih akibat pandemi. Namun demikian, pengusaha di Sleman bakal mematuhi aturan UMK tersebut.

Senada, Fajar Yulianto juga mengaku bisa menerima besaran UMP yang sebenarnya belum memuaskan pekerja. "Apaboleh budat, kondisi memang belum kondusif. Daripada perusahaan tutup karena tidak mampu membayar UMP," tandasnya. (Has)-f

KPI Mina Kebon Panen Ikan Patin

NGAGLIK (KR) - Bupati Sleman Kustini melakukan panen raya ikan patin di Kelompok Pembudidaya Ikan (KPI) Mina Kebon Jongkang Sariharjo Ngaglik, Selasa (30/11). Selain itu juga meresmikan jalan untuk jogging track sepanjang 360 meter yang di kanan kirinya terdapat pohon buah-buahan dan kolam ikan, serta menyerahkan sertifikat kelas utama kepada KPI Mina 21 di Demangan Maguwoharjo Depok.

Ketua KPI Mina Kebon M Imam S Bonso mengungkapkan, sebelumnya menerima bibit ikan patin sebanyak 5.100 bibit pada 18 Mei 2021. Bibit tersebut berasal dari Pemkab Sleman dengan anggaran DAK Kelautan dan Perikanan. Kemudian bibit tersebut dipelihara di tiga kolam berbeda milik anggota KPI Mina Kebon selama 6 bulan 10 hari. "Dari ketiga kolam tersebut mendapat keuntungan bersih sebesar Rp 22.957.000," ujarnya.

Sementara Bupati mengapresiasi upaya

diversifikasi yang dilakukan oleh para pembudidaya ikan KPI Mina Kebon, sehingga dapat mencapai hasil yang baik dan memberikan nilai tambah bagi petani ikan. "Saya berharap ini dapat ditularkan kepada kelompok-kelompok petani ikan yang lain," ungkapnya.

Bupati juga mendorong antarkelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Sleman harus saling mendukung. Antarkelompok harus menjalin kerja sama, sehingga kelompok petani ikan yang maju dapat mendorong kelompok lain untuk maju bersama. "Kunci utama pembangunan perikanan di Kabupaten Sleman adalah menjaga komunikasi yang didasari keterbukaan yang bertanggungjawab, keikhlasan dan kepercayaan serta saling menghargai, sehingga terjadi keselarasan dan keharmonisan dalam bersama-sama membangun Perikanan Kabupaten Sleman," tambahnya.

(Has)-f

MLATI (KR) - Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah yang berhasil menurunkan lonjakan kasus Covid-19 yang disebabkan adanya mutasi virus. Namun capaian penurunan kasus saat ini sebaiknya tetap membuat waspada.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman dr Cahya Purnama di sela Gebyar Husada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Kabupaten Sleman di Grha Sarina Vidi, Selasa (30/11). Pada kesempatan itu juga diluncurkan Telekonsultasi Online Mata Hati dan penyerahan bantuan mobil operasional. "Dinkes Sleman juga telah berupa-



KR-Istimewa

Bupati meluncurkan Telekonsultasi Online.

upaya dalam menekan pandemi Covid-19 dapat dilalui dengan capaian yang baik.

Pemkab Sleman berkomitmen menjadikan pelaksanaan peringatan HKN ke-57 sebagai momentum untuk bangkit meningkatkan derajat kesehatan ma-

syarakat. Berbagai capaian positif di sektor kesehatan telah diraih Kabupaten Sleman.

"Di antaranya Penurunan Angka Stunting menjadi 6,92% turun dibandingkan tahun 2020, Pelaksana Terbaik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga Kategori Kabupaten tahun 2021, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kategori Enabling Environment dan STBM berkelanjutan Lima Pilar Kabupaten, Indeks Keluarga Sehat (IKS) tertinggi pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK), dan Tenaga Kesehatan Teladan (dokter dan nutritionis) tingkat Nasional," beber Bupati. (Has)-f

DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

PANSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Meningkatkan Potensi Pendapatan Daerah

SLEMAN (KR) - Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kabupaten Sleman sedang membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya raperda yang baru, diharapkan nantinya dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah Kabupaten Sleman.

Ketua Pansus 1 DPRD Kabupaten Sleman Yani Fathurrahman SpdI mengatakan, raperda ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7u Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Di mana aturan di atas itu mengamanatkan agar setiap daerah mempunyai payung hukum pengelolaan keuangan berbasis akrual paling lambat 2022.

"Ini merupakan raperda delegasi dari pemerintah pusat. Di mana setiap daerah, pada 2022 sudah mempunyai perda tentang pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual," kata Yani, Selasa (30/11).

Menurutnya, raperda pengelolaan keuangan daerah ini nantinya akan menggantikan Perda No 7



KR-Saifullah Nur Ichwan

Yani Fathurrahman SpdI

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam perda itu, masih basis kas yakni sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat berdasarkan transaksi kas yang masuk atau keluar.

"Misalnya ada transaksi terkait utang atau piutang tapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi tidak tercatat. Sedangkan kalau basis akrual yaitu sebuah teknik pencatatan dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima atau kas belum dikeluarkan," paparnya.

Dengan basis akrual ini, diharap-

kan nantinya dapat menggali potensi pendapatan daerah Kabupaten Sleman. Mengingat ketika pemerintah daerah memiliki hak untuk melakukan pengalihan akan tercatat sebagai pendapatan.

"Jadi nanti akan terlihat seberapa besar potensi yang seharusnya bisa didapat oleh pemerintah daerah dan seberapa realisasinya. Ketika banyak yang belum masuk ke kas daerah, otomatis itu bisa jadi piutang dan dapat dioptimalkan untuk dilakukan penagihan," ujar politisi dari Fraksi PKS ini.

Piutang daerah dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak dengan penetapan bupati untuk jumlah sampai Rp 5 miliar. Namun jika lebih dari Rp 5 miliar, bupati harus minta persetujuan dari DPRD. "Penghapusan ditetapkan oleh bupati atau bupati dengan persetujuan DPRD dalam bentuk keputusan bupati atau keputusan bupati dengan persetujuan DPRD," terang anggota dewan dari Cangkringan ini.

Lebih lanjut dikatakan Yani, raperda ini juga mengatur tentang hak pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan dan pengeluaran daerah.

"Tak hanya itu, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum," pungkaskannya. (Sni)-f

PANSUS RAPERDA RTRW

Mendorong Pemerataan LP2B di Kabupaten Sleman

SLEMAN (KR) - DPRD Kabupaten Sleman akan mengupayakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sleman Barat. Salah satunya dengan pemerataan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di seluruh kapanewon, sehingga tidak hanya dititik beratkan di wilayah Sleman. Harapannya Sleman Barat nantinya akan lebih maju dan bisa bersaing dengan wilayah lainnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, Bambang Sigit Sulaksono ST mengatakan, dalam program LP2B ini, pemerintah pusat melalui provinsi tidak menunjuk lokasi yang masuk LP2B, namun hanya menunjuk luasan LP2B.

"Kemudian pemerintah daerah Sleman memploting LP2B ini mayoritas di Sleman Barat. Sedangkan kapanewon lainnya tidak sebesar dengan Sleman Barat," kata Bambang, Selasa (30/11).

Dengan cara itu, menurut Bambang, Pemkab Sleman telah menciptakan masyarakat Sleman barat miskin secara masif. Bagaimana tidak, Sleman Barat tidak bisa berkembang seperti daerah lainnya karena lahannya hanya diperbolehkan untuk pertanian. "Bagaimana masyarakat Sleman Barat mengembangkan usaha, kalau lahannya hijau semua. Dan masyarakat dipaksa hanya untuk bertani," ujarnya.

Untuk itu, Pansus DPRD Kabupaten Sleman akan mendorong kepada pemerintah daerah supaya program LP2B itu dilakukan pemerataan di seluruh kapanewon. Mengingat LP2B itu tidak hanya padi dan palawija saja, namun pangan pokok yang segala sesuatunya berasal dari sumber hayati bisa masuk LP2B.



KR-Saifullah Nur Ichwan

Bambang Sigit Sulaksono ST

Pemerataan itu, lanjut Bambang, harus termuat dalam Raperda RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sleman Barat. "Kenapa itu penting, karena besok itu exit tol berada di Sleman Barat. Supaya nanti di Sleman Barat bisa tumbuh pusat ekonomi baru," terang Wakil Ketua Komisi A ini.

Kemudian Pansus juga mendorong di Sleman Barat dijadikan kawasan wisata pertanian. Dengan penerapan itu, pemerintah daerah punya kewajiban untuk menganggarkan dalam peningkatan dan

pengembangan kawasan wisata pertanian. "Kami lebih mendorong Sleman Barat jadi tempat wisata pertanian. Dan pemerintah daerah perlu campur tangan untuk mengembangkan," tuturnya.

Selain itu, Pansus mengusulkan di Sleman Barat ada fasilitas kesehatan dan pendidikan. Ke depannya pemerintah daerah perlu membuat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sehingga nantinya di Sleman akan memiliki 3 RSUD.

Di samping itu, Pansus juga menyuarakan tentang penataan warisan geologi atau geoheritage di kompleks perbukitan intrusi Kalurahan Sidorejo Godean. Pihaknya mempertanyakan izin pemangkasan perbukitan di Sidorejo Godean sudah sesuai RTRW yang lama atau belum.

"Itu jadi perhatian kami soal pemangkasan perbukitan di Sidorejo. Dalam keputusan Menteri ESDM sudah jelas tidak hanya menunjuk beberapa perbukitan saja, tapi menunjuk kompleks perbukitan intrusi Godean. Artinya semua perbukitan disitu masuk sebagai geoheritage. Tapi ternyata ada beberapa perbukitan disana yang dipangkas," tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini. (Sni)-f



KR-Saifullah Nur Ichwan

Tim Pansus pengelolaan keuangan daerah rapat dengan instansi terkait.



KR-Saifullah Nur Ichwan

Pansus RTRW saat rapat dengan eksekutif.